

Kolaborasi dan Akselerasi Layanan Dasar di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Juni 2025



Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen mewujudkan provinsi yang lebih sehat, cerdas, maju, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial yang inklusif, memastikan pemerataan pendidikan berkualitas, memperkuat infrastruktur berkelanjutan guna mendukung perekonomian yang kompetitif, serta mendorong kesejahteraan sosial dan kesetaraan peluang agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan bermartabat.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi dengan SKALA, Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, dengan fokus pada penguatan tata kelola, integrasi data, pengelolaan keuangan publik, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif. Melalui inisiatif peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan, dan asistensi teknis, Pemerintah NTT berupaya mewujudkan visinya untuk menciptakan NTT yang lebih inklusif dan sejahtera.



Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Fiskal Daerah

Tata kelola yang baik, aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, optimalisasi pendapatan daerah, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan elemen penting dalam misi dan program Gubernur NTT terpilih. Pemerintah Provinsi NTT mendorong upaya ini melalui berbagai inisiatif strategis sebagai berikut:

- **Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Penganggaran:**

Memfasilitasi pelatihan dan asistensi teknis terkait kebijakan anggaran daerah, perencanaan fiskal, dan belanja wajib untuk infrastruktur layanan publik guna memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara efisien dan akuntabel.

- **Penguatan Kapasitas ASN dan Perangkat Desa:**

Melatih ASN daerah dan perangkat desa dalam penggunaan aplikasi **SEPAKAT** (Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terpadu) untuk melakukan analisis berbasis data makro dan mikro, memastikan perencanaan dan penganggaran lebih berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- **Harmonisasi Regulasi Daerah dengan Kebijakan Nasional:**

Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam penyusunan regulasi daerah, termasuk **Dokumen Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia** untuk Provinsi NTT, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kebijakan pajak dan retribusi daerah, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.

- **Pemanfaatan Data dalam Pengambilan Keputusan:**

Melatih ASN di 16 kabupaten/kota dalam penggunaan sistem **E-SPM** untuk memantau dan melaporkan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan publik melalui pelaporan berbasis digital.

- **Optimalisasi Pendapatan Daerah:**

Memperkuat pengelolaan pajak daerah di 22 kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan sesuai target.

- **Edukasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):**

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dengan target peningkatan pendapatan PKB sebesar **25% pada awal 2025** dibandingkan awal 2024.



Penyediaan Layanan Dasar yang Inklusif

Sejalan dengan prioritas Gubernur NTT dalam memperkuat layanan dasar melalui peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan layanan publik, Pemerintah NTT telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memastikan layanan dasar yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat. Upaya ini mencakup:

- **Integrasi Data Bantuan Sosial:**

Mendukung pengelolaan data bantuan sosial bagi **24.560 individu rentan** di **22 kabupaten/kota** melalui kolaborasi dengan **Bapperida** dan **Dinas Sosial**, memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan berbasis data.

- **Peningkatan Kualitas SPM:**

Bekerja sama dengan **Tim Pelaksana SPM Provinsi** untuk memberikan dukungan teknis dan pengawasan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya di **Kabupaten Timor Barat** dan **Sumba**, guna memastikan standar pelayanan minimal (SPM) terpenuhi secara optimal.

- **Peningkatan Kinerja Layanan Publik:**

Berkontribusi dalam memperbaiki kualitas layanan di seluruh kabupaten/kota, di mana wilayah dengan **kinerja terendah** kini telah mencapai status **"Tuntas Pratama"** atau lebih tinggi, mencerminkan perbaikan signifikan dalam pemenuhan layanan dasar.

- **Penguatan Pendanaan Berkelanjutan:**

Mendukung pengembangan **regulasi**, peningkatan **kapasitas**, dan sosialisasi di **22 kabupaten/kota** untuk memperkuat pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi penyediaan layanan dasar.



Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan, dan Kualitas Hidup

Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, dan kualitas hidup yang bermartabat merupakan bagian utama dari visi gubernur untuk masa depan NTT mendukung visi ini melalui berbagai upaya berikut:

- **Penerapan Strategi Kesetaraan dan Inklusi Sosial:** bekerja sama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang berfokus pada kelompok lanjut usia, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas serta Rencana Aksi Daerah Kesejahteraan Lansia.

- **Peningkatan Aksesibilitas dalam Kebijakan dan Partisipasi Publik:** memastikan keterlibatan kelompok disabilitas dalam perumusan kebijakan dengan menyediakan tempat acara yang ramah disabilitas serta menghadirkan juru bahasa isyarat dalam kegiatan pemerintah yang didukung oleh SKALA.

- **Penguatan Perencanaan yang Inklusif:** mendukung pemerintah daerah dan OMS dalam pengembangan kebijakan serta peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan bagi 40 staf Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menerapkan penganggaran yang responsif gender.



Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

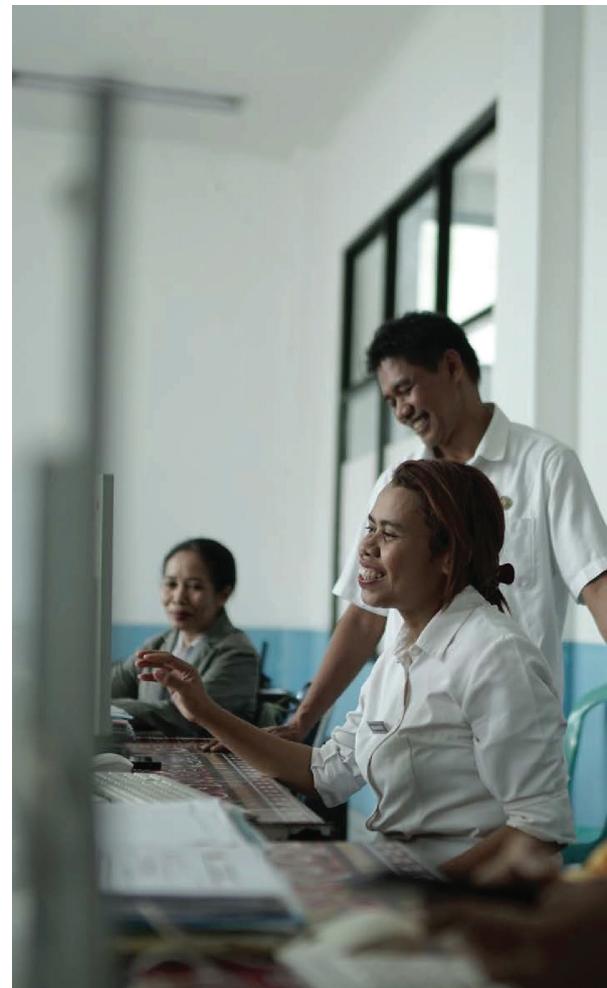
Pilar Kolaborasi yang merupakan pilar ketujuh dalam Program Prioritas Gubernur NTT secara strategis didukung oleh berbagai program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil, terutama dalam pelayanan bagi kelompok rentan, melalui:

- **Fasilitasi Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren):** menginisiasi model kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam bentuk Musik Keren di Provinsi NTT. Inisiatif ini telah diperkuat melalui Pergub No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan.
- **Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Fasilitator ASN:** memberikan pelatihan kepada 15 OMS dan 10 fasilitator dari ASN daerah untuk memastikan Musrenbang Inklusif berjalan dengan baik. Forum ini memungkinkan kelompok rentan—termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas adat terpencil—menyampaikan aspirasi secara bermakna dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Menyelaraskan Kebijakan dengan Tantangan Gubernur Terpilih

Salah satu tantangan utama bagi pemerintahan baru adalah efisiensi anggaran APBD Provinsi NTT. Kondisi ini menuntut pengelolaan keuangan yang lebih hemat serta fokus pada program-program prioritas, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 2,03 triliun. Provinsi NTT berupaya mengatasi tantangan tersebut melalui:

- **Penguatan Perencanaan Berbasis Data:** mengembangkan kebijakan yang lebih akurat dan terkini berdasarkan data, sehingga sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan NTT 2025-2029.
- **Optimalisasi Alokasi Anggaran:** meningkatkan pengelolaan fiskal agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk layanan esensial.
- **Fasilitasi Integrasi SPM:** menyelaraskan SPM dengan rencana pembangunan daerah untuk menjaga kualitas layanan publik meskipun terdapat keterbatasan anggaran.



Dukungan Utama

Program SKALA berkomitmen untuk mendukung visi gubernur terpilih dengan memprioritaskan beberapa bidang berikut:



Penguatan Perencanaan Pembangunan: Memberikan masukan teknis untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT 2025-2029. Program ini juga memastikan kebijakan yang diambil responsif terhadap GEDSI, berbasis data, serta selaras dengan SPM. Selain itu, SKALA akan mendukung penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan perubahan asumsi tahun 2025 dan 2026.



Peningkatan Pengelolaan Fiskal: Mengkaji potensi pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas staf Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak, serta memberikan asistensi teknis terkait efisiensi belanja daerah sesuai dengan Instruksi Presiden 1/2025.



Peningkatan Pemanfaatan Data: Mendorong implementasi Rencana Aksi Satu Data NTT melalui Keputusan Gubernur dan daftar data resmi, serta mengembangkan Portal Satu Data bernama SASANDO (Sistem Analisis dan Statistik Data Integrasi Online).



Peningkatan Koordinasi dan Efisiensi: Mendukung kegiatan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan (Korbinwas), serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.



Penguatan Sistem Kesejahteraan Sosial: Melanjutkan pengembangan Portal SIPEKA MANIS (Sistem Pelayanan Kemiskinan untuk Masyarakat Inklusif) guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data kelompok miskin dan rentan.



SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

 skala.or.id  communications@skala.or.id

 <https://s.id/Channel-SKALA>

